



Optimalisasi Potensi Sumberdaya Nasional Menuju Swasembada Pangan dan Kelestarian Lingkungan yang Berkelanjutan

Oleh:

Dr Ir Abdul Munif, MSc, Agr.

Sekretaris Menteri Pertanian dan Staf Pengajar Fakultas Pertanian IPB

ABSTRAK

Belajar dari pengalaman masa lalu dan kondisi yang dihadapi saat ini, sudah selayaknya sektor pertanian menjadi sektor unggulan dalam menyusun strategi pembangunan nasional. Sektor pertanian haruslah diposisikan sebagai sektor andalan perekonomian nasional. Hal ini sejalan dengan prioritas pembangunan ekonomi *Kabinet Indonesia Bersatu*, dimana salah satunya adalah *Revitalisasi Pertanian dan Perdesaan*.

Revitalisasi Pertanian dan Perdesaan, secara garis besar ditujukan untuk : (a) meningkatkan peran sektor pertanian dalam perekonomian nasional, (b) menciptakan lapangan kerja berkualitas di perdesaan, khususnya lapangan kerja non-pertanian, yang ditandai dengan berkurangnya angka pengangguran terbuka dan setengah terbuka, dan (c) meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan dan masyarakat perdesaan, yang dicerminkan dari peningkatan pendapatan dan produktivitas pekerja di sektor pertanian.

Sebagai sektor andalan, sektor pertanian mempunyai peran langsung dan tidak langsung dalam perekonomian nasional. Peran langsung sektor pertanian dalam perekonomian nasional adalah melalui pembentukan PDB, penyediaan sumber devisa melalui ekspor, penyediaan pangan dan bahan baku industri, pengentasan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja dan perbaikan pendapatan masyarakat. Sementara, peran tidak langsung sektor pertanian dalam perekonomian nasional, yaitu melalui efek pengganda (*multiplier effect*) berupa keterkaitan input-output antar industri, konsumsi dan investasi.

Pembangunan pertanian dapat memperbaiki pendapatan penduduk secara lebih merata dan berkelanjutan, serta pada akhirnya dapat memakmurkan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Pengamatan empiris di banyak negara maju menunjukkan bahwa tahapan pembangunan berkelanjutan yang digerakkan oleh sektor industri (barang dan jasa) berbasis ilmu dan teknologi modern perlu didahului dengan pencapaian tahapan pembangunan pertanian yang handal dan kuat. Pada umumnya, negara di dunia yang pendapatan per kapitanya kurang dari US \$ 2500, pertanian masih menjadi sektor yang sangat penting bagi perekonomian nasionalnya. Bagi negara-negara tersebut, pertanian menjadi tulang punggung bagi tegaknya ekonomi negara. Pertanian tidak saja menyediakan kebutuhan pangan bagi penduduknya, tetapi juga merupakan sumber pendapatan devisa (ekspor), dan sebagai pendorong dan penarik bagi tumbuhnya industri nasional.

Keynote speaker dalam "SEMINAR ON AGRICULTURAL SCIENCES 2009" DI Tokyo University of Agriculture, Jepang, pada Tanggal 22 Februari 2009 yang diadakan oleh Indonesian Agricutural Sciences Association (IASA).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang memungut dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta dilindungi undang-undang (Institut Pertanian Bogor)



Pendahuluan

Di dalam kitab suci Al Quran banyak terdapat ayat yang berkaitan dengan masalah pertanian dan pangan dan kewajiban bagi manusia untuk memperhatikan apa yang akan dimakan. Salah satunya adalah terdapat dalam surah 'Abasa ayat 24-32: *Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit). kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu. Anggur dan sayur-sayuran, Zaitun dan kurma. kebun-kebun (yang) lebat. dan buah-buahan serta rumput-rumputan. Untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.* Ayat-ayat al Quran tersebut menegaskan agar manusia memperhatikan apa yang akan ditanam, jenis tanaman, pengelolaan pangan agar tidak kelaparan.

Pangan, selain merupakan komoditas strategis, juga erat kaitannya dengan stabilitas ekonomi dan stabilitas sosial politik nasional. Sebagai negara agraris, sudah sewajarnya ketahanan pangan yang juga mengandung arti kemandirian pangan (*self-reliance*) dapat direalisasikan di negeri tercinta ini. Karena itu, sudah saatnya kita menanamkan kepercayaan diri, dan membangun semangat kemandirian.

Namun masalahnya di tengah tingginya kebutuhan pangan yang meningkat terus, ketersediaan pangan berpotensi menurun. Hal ini akibat makin tingginya laju alih fungsi lahan sawah terutama di Pulau Jawa yang notabene sebagai pemasok utama beras nasional.

Saat ini alih fungsi lahan pertanian untuk sektor lain seperti pembangunan perumahan industri dan jalan mencapai 100--110 ribu hektare per tahun. Sementara itu jumlah petani gurem dengan kepemilikan lahan kurang dari 0,5 ha/keluarga juga semakin meningkat. Masalah lainnya makin beratnya dampak kemarau, menipisnya ketersediaan air irigasi, dan mulai terjadinya perlandaian (*leveling off*) produktivitas lahan sawah. Sehingga jika kondisi ini dibiarkan, kita akan semakin terperosok ke dalam ketergantungan berbagai kebutuhan pokok negara lain.

Seperti kita ketahui, dunia dalam setahun ini mengalami krisis finansial yang cukup hebat. Tak kurang sebagian besar negara di Eropa dan belahan dunia lainnya

Keynote speaker dalam "SEMINAR ON AGRICULTURAL SCIENCES 2009" DI Tokyo University of Agriculture, Jepang, pada Tanggal 22 Februari 2009 yang diadakan oleh Indonesian Agricutural Sciences Association (IASA).



mengalami dampak krisis tersebut. Kondisi ini semakin memperparah krisis energi dan pangan yang sebelumnya terjadi.

Krisis minyak dunia menyebabkan beralihnya pemenuhan bahan bakar minyak fosil kepada sumber bahan bakar bio-energi. Hal ini tentunya mengakibatkan pemanfaatan komoditi hasil pertanian dan tanaman pangan menjadi bio-energi. Suplai pangan dunia menjadi turun dan harganya terus meningkat. Faktor perubahan iklim global juga menjadi penyebab menurunnya produksi pangan dunia di sebagian besar negara-negara penghasil pangan. Ancaman kekurangan pangan semakin terbuka.

Sesuai dengan Undang-undang No.7 tahun 1996, pengertian ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya, aman dikonsumsi, merata dan terjangkau. Fokus kebijakan peningkatan ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi seluruh rumah tangga, dalam jumlah yang cukup, mutu dan gizi yang layak, aman dikonsumsi, merata serta terjangkau oleh setiap individu.

Ketahanan pangan merupakan rangkaian tiga komponen utama, salah satunya subsistem ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan mencakup aspek produksi, pengelolaan cadangan, serta keseimbangan antara ekspor dan impor pangan. Ketersediaan pangan harus dikelola dengan baik sehingga dapat menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk dari segi kualitas, kuantitas, keragaman dan kemasannya. Sebagai acuan kuantitatif adalah Angka Kecukupan Gizi (AKG) rekomendasi Widya Karya Pangan dan Gizi sebesar 2.200 kalori/kapita/hari untuk energi, dan 57 gram/kapita/hari untuk protein (Khomsan, 2003).

Menteri Pertanian RI, Dr. Anton Apriyantono menyatakan bahwa angka pertumbuhan PDB sektor pertanian yang terbilang tinggi dan bahkan telah melampaui target. Pertumbuhan 5,3% juga lebih baik dari rekor 2007 yang mencapai 4,6%. Dalam Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) 2008, Departemen Pertanian mencantumkan target pertumbuhan 3,6%.

Keynote speaker dalam "SEMINAR ON AGRICULTURAL SCIENCES 2009" DI Tokyo University of Agriculture, Jepang, pada Tanggal 22 Februari 2009 yang diadakan oleh Indonesian Agricutural Sciences Association (IASA).



Selama ini, pertumbuhan sektor pertanian terbilang rendah. Amat jarang melampaui angka 3,6%. Karena itu, pada ekspose pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan III 2007, Kepala BPS menegaskan, dalam 20 tahun terakhir hanya tiga kali sektor pertanian bisa tumbuh di atas 3%.

PENCAPAIAN INDIKATOR MAKRO EKONOMI PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN UPAYA PENINGKATANNYA

Secara makro capaian pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian dalam arti luas (termasuk perikanan dan kehutanan) selama tahun 2005 sampai 2007 rata-rata sebesar 3,32 persen. Jika dibandingkan dengan target pertumbuhan PDB sektor pertanian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maka capaian pertumbuhan PDB pada tahun 2005 dan 2006 yang masing-masing sebesar 2,50 persen dan 2,85 persen masih berada di bawah target yang diharapkan, yakni 3,20 persen (2005) dan 3,40 persen (2006). Namun capaian PDB sektor pertanian pada tahun berikutnya meningkat secara signifikan pada tingkat 4,62 persen jika dibandingkan target RPJMN tahun 2007 sebesar 3,60 persen. Dengan demikian target rata-rata pertumbuhan PDB RPJMN pada periode 2005 – 2009 sebesar 3,52 persen diharapkan dapat tercapai pada tahun 2009 (Tabel 1). Ke depan pertumbuhan PDB sektor pertanian perlu terus diupayakan, agar peranan sektor pertanian dalam memacu pertumbuhan perekonomian nasional semakin nyata.

Tabel 1. Capaian dan Target Pertumbuhan PDB RPJMN Tahun 2005 - 2009 (%)

Tahun	Target RPJMN (Pertanian Luas)	Capaian Pertanian
2005	3,20	2,50
2006	3,40	2,85
2007	3,60	4,62
2008	3,60	-
2009	3,80	-
Rata-rata	3,52	3,32

Keynote speaker dalam "SEMINAR ON AGRICULTURAL SCIENCES 2009" DI Tokyo University of Agriculture, Jepang, pada Tanggal 22 Februari 2009 yang diadakan oleh Indonesian Agricutural Sciences Association (IASA).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Sementara itu, produksi enam komoditas utama pertanian selama tahun 2006 hingga awal 2008 juga menunjukkan tingkat pertumbuhan yang positif, kecuali untuk komoditas kedelai yang mengalami rata-rata penurunan pertumbuhan sebesar 20,76 persen selama periode tahun 2006 – 2007. Komoditas utama pertanian yang menunjukkan kenaikan pertumbuhan produksi dalam kurun waktu dua tahun terakhir adalah padi (4,77%), jagung (14,44%), gula (6,10%), kelapa sawit (6,09%) dan daging sapi (5,61%).

Selanjutnya, dilihat dari sisi Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) sangat bergantung pada angka indeks penerimaan dan pembayaran yang dilakukan petani. Peningkatan indeks yang dibayar petani sangat bergantung pada hasil kebijakan yang berada di luar kontrol Departemen Pertanian, sementara peningkatan indeks yang diterima petani cukup banyak ditentukan dari hasil kebijakan Departemen Pertanian. NTP bukan ukuran kinerja sektor pertanian karena walaupun indeks yang diterima petani meningkat belum tentu NTP meningkat, masih sangat tergantung pada indeks yang dibayar petani. Namun demikian NTP dapat dijadikan salah satu indikator tingkat kesejahteraan petani yang merupakan resultante dari kebijakan antar sektor yang terkait dengan kehidupan pedesaan. Dalam kurun waktu 2005 – 2007, NTP menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, yakni meningkat sebesar 100,95 (2005) menjadi 102,49 dan 106,97 pada tahun 2006 dan akhir 2007. Untuk meningkatkan NTP Pemerintah mengupayakan agar peningkatan indeks yang dibayar petani tidak terlalu progresif.

Khusus untuk sektor peternakan, peran strategis peternakan juga berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan. Pemerintahan telah menetapkan tiga sasaran utama program penanggulangan kemiskinan, yakni : menurunnya persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan menjadi 8,2 persen pada tahun 2009, terpenuhinya kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau, dan terpenuhinya pelayanan kesehatan yang bermutu. Usaha yang banyak dilakukan adalah memadukan usaha tani tanaman pangan dengan memelihara ternak, terutama ruminansia (hewan pemamah biak) kecil dan unggas. Bahkan Organisasi Pangan Dunia (FAO) mencatat ternak memberikan kontribusi yang signifikan pada lebih dari 70 persen penduduk miskin di dunia atau sekitar 700 juta orang. Semakin

Keynote speaker dalam “SEMINAR ON AGRICULTURAL SCIENCES 2009” DI Tokyo University of Agriculture, Jepang, pada Tanggal 22 Februari 2009 yang diadakan oleh Indonesian Agricutural Sciences Association (IASA).



miskin sebuah rumah tangga, karena skala usaha tani yang sempit, sumbangan peternakan terhadap pendapatan semakin besar. Peternakan dikembangkan melalui dua pola, yakni peternakan industri dan peternakan rakyat. Keduanya harus dilakukan secara proporsional, karena masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan.

VISI DAN ARAH PEMBANGUNAN PERTANIAN JANGKA PANJANG, 2005-2025.

Lingkungan strategis internasional yang paling dominan dalam mendorong perubahan struktur perekonomian dan tatanan masyarakat dunia dalam jangka panjang adalah : (1) liberalisasi pasar global dan ketidakadilan perdagangan internasional; (2) perubahan sistem dan manajemen produksi; (3) perhatian pada perwujudan ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan (*Millenium Development Goals*); dan (4) kemajuan pesat dalam penemuan dan pemanfaatan teknologi tinggi. Di lain pihak, lingkungan strategis tingkat nasional yang dominan mempengaruhi perubahan struktur perekonomian dan tatanan masyarakat ke depan adalah : (1) dinamika permintaan pangan dan bahan baku; (2) kelangkaan dan degradasi kualitas sumberdaya alam (lahan dan air); serta (3) manajemen pembangunan: otonomi daerah dan partisipasi masyarakat.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, Departemen Pertanian telah menyusun Cetak Biru (*Blue Print*) Pembangunan Pertanian Jangka Panjang (2005 - 2025), Jangka Menengah (2005-2009) dan tahunan. Tujuan akhir pembangunan pertanian adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat pertanian melalui sistem pertanian industrial. Oleh karena itu, pembangunan jangka panjang sektor pertanian berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat pertanian. Sasaran jangka panjang pembangunan pertanian yaitu: (1) Terwujudnya Sistem Pertanian Industrial yang Berdayasaing; (2) Mantapnya Ketahanan Pangan Secara Mandiri; (3) Terciptanya Kesempatan Kerja Penuh Bagi Masyarakat Pertanian; dan (4) Terhapusnya Kemiskinan di Sektor Pertanian dan Tercapainya Pendapatan Petani US\$ 2500/kapita/tahun.

Keynote speaker dalam "SEMINAR ON AGRICULTURAL SCIENCES 2009" DI Tokyo University of Agriculture, Jepang, pada Tanggal 22 Februari 2009 yang diadakan oleh Indonesian Agricutural Sciences Association (IASA).



Mengacu pada sasaran pembangunan jangka panjang di atas, maka visi pembangunan pertanian tahun 2025 adalah: *“Terwujudnya sistem pertanian industrial berkelanjutan yang berdayasaing dan mampu menjamin ketahanan pangan dan kesejahteraan petani”*. Visi pembangunan pertanian 2025 diimplementasikan melalui kebijakan yang diarahkan untuk mendorong proses transformasi usaha pertanian menuju sistem pertanian.

Garis besar kebijakan yang akan dilakukan adalah : (1) Membangun Basis bagi Partisipasi Petani; (2) Meningkatkan Potensi Basis Produksi dan Skala Usaha Pertanian; (3) Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Sumberdaya Insani Pertanian yang Berkualitas; (4) Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Pertanian; (5) Mewujudkan Sistem Pembiayaan Pertanian Tepat Guna; (6) Mewujudkan Sistem Inovasi Pertanian; (7) Penyediaan Sistem Insentif dan Perlindungan Bagi Petani; (8) Mewujudkan Sistem Usahatani Bernilai Tinggi Melalui Intensifikasi Diversifikasi dan Pewilayahan Pengembangan Komoditas Unggulan; (9) Mewujudkan Agroindustri Berbasis Pertanian Domestik di Pedesaan; (10) Mewujudkan Sistem Rantai Pasok Terpadu Berbasis Kelembagaan Pertanian yang Kokoh; (11) Menerapkan Praktek Pertanian dan Manufaktur yang Baik; dan (12) Mewujudkan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berpihak Kepada Petani dan Pertanian.

VISI, MISI DAN TUJUAN PEMBANGUNAN PERTANIAN JANGKA MENENGAH, 2005-2009.

Pada awal tahun 2005, Presiden RI telah mencanangkan program prioritas pembangunan nasional 2005-2009, yaitu Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) dengan tujuan untuk : (1) mengurangi kemiskinan; (2) mengurangi pengangguran; (3) meningkatkan daya saing usaha dan produk; (4) membangun ketahanan pangan; (5) membangun perdesaan; (6) membangun dan mengurangi ketimpangan antar daerah; (7) membangun kesinambungan kegiatan pembangunan PPK; dan (8) melestarikan lingkungan hidup.

Agenda pembangunan dalam RPJMN yang terkait dengan pembangunan pertanian, antara lain : (1) revitalisasi pertanian; (2) peningkatan investasi dan

Keynote speaker dalam “SEMINAR ON AGRICULTURAL SCIENCES 2009” DI Tokyo University of Agriculture, Jepang, pada Tanggal 22 Februari 2009 yang diadakan oleh Indonesian Agricutural Sciences Association (IASA).



ekspor non-migas; (3) pemantapan stabilisasi ekonomi makro; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) pembangunan perdesaan; dan (6) perbaikan pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup. Revitalisasi pertanian antara lain diarahkan untuk meningkatkan : (1) kemampuan produksi beras dalam negeri sebesar 90-95 persen dari kebutuhan (dalam prakteknya tahun 2004 dan 2005 kita sudah swasembada); (2) diversifikasi produksi dan konsumsi pangan; (3) ketersediaan pangan asal ternak; (4) nilai tambah dan daya saing produk pertanian; dan (5) produksi dan ekspor komoditas pertanian.

Berlandaskan program prioritas pembangunan nasional tentang RPPK tersebut, maka strategi dan kebijakan pembangunan pertanian 2005-2009 disusun berlandaskan pada RPJMN. Visi RPJMN adalah : *“terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan berkelanjutan”*.

Untuk mencapai visi tersebut di atas, Departemen Pertanian mengemban misi yang harus dilaksanakan, yaitu : (1) mewujudkan birokrasi pertanian yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi; (2) mendorong pembangunan pertanian yang tangguh; (3) mewujudkan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi dan penganekaragaman konsumsi; (4) mendorong peningkatan peran sektor pertanian terhadap perekonomian nasional; (5) meningkatkan akses pelaku usaha pertanian terhadap sumberdaya dan pelayanan; dan (6) memperjuangkan kepentingan dan perlindungan terhadap petani dan pertanian dalam sistem perdagangan domestik dan global.

Adapun tujuan pembangunan pertanian jangka menengah, 2005-2009 adalah : (1) membangun SDM aparatur profesional, petani mandiri, dan kelembagaan pertanian yang kokoh; (2) meningkatkan pemanfaatan sumberdaya pertanian secara berkelanjutan; (3) memantapkan ketahanan dan keamanan pangan; (4) meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian; (5) menumbuhkembangkan usaha pertanian yang akan memacu aktivitas ekonomi perdesaan; dan (6) membangun sistem manajemen pembangunan pertanian yang berpihak kepada petani.

Keynote speaker dalam “SEMINAR ON AGRICULTURAL SCIENCES 2009” DI Tokyo University of Agriculture, Jepang, pada Tanggal 22 Februari 2009 yang diadakan oleh Indonesian Agricutural Sciences Association (IASA).



Sementara sasaran utama pembangunan pertanian yang perlu dicapai ke depan adalah : (1) meningkatnya ketahanan pangan nasional yang meliputi meningkatnya kapasitas produksi komoditas pertanian dan berkurangnya ketergantungan terhadap pangan impor sekitar 5-10 persen dari produk domestik; (2) meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian yang meliputi mutu produk primer pertanian, meningkatnya keragaman pengolahan produk pertanian dan meningkatnya ekspor serta surplus perdagangan komoditas pertanian; dan (3) meningkatnya kesejahteraan petani yang meliputi meningkatnya produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian dan menurunnya insiden kemiskinan.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN JANGKA MENENCAH

Strategi umum untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pertanian tersebut adalah : (1) melaksanakan manajemen pembangunan yang bersih, transparan dan bebas KKN; (2) meningkatkan koordinasi dalam penyusunan kebijakan dan manajemen pembangunan pertanian; (3) memperluas dan memanfaatkan basis produksi secara berkelanjutan; (4) meningkatkan kapasitas kelembagaan dan memberdayakan SDM pertanian; (5) meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian; (6) meningkatkan inovasi dan diseminasi teknologi tepat guna; dan (7) mempromosikan dan memproteksi komoditas pertanian.

Beberapa kebijakan strategis terkait dengan instansi lain yang perlu mendapat penanganan segera, yaitu :

- a. Kebijakan di bidang infrastruktur pertanian, meliputi pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, perluasan lahan pertanian terutama di luar Jawa, pencegahan konversi lahan terutama di Jawa, pengembangan jalan usahatani dan jalan produksi serta infrastruktur lainnya.
- b. Kebijakan perlindungan/stabilisasi harga komoditas pertanian. Kepastian harga merupakan hal penting bagi kelangsungan usaha pertanian dan peternakan.
- c. Kebijakan perdagangan yang memfasilitasi kelancaran pemasaran baik di pasar dalam negeri maupun ekspor. Selain itu, untuk melindungi sektor pertanian dari

Keynote speaker dalam "SEMINAR ON AGRICULTURAL SCIENCES 2009" DI Tokyo University of Agriculture, Jepang, pada Tanggal 22 Februari 2009 yang diadakan oleh Indonesian Agricutural Sciences Association (IASA).



- persaingan di pasar dunia, diperlukan : (1) upaya untuk memperjuangkan konsep *Strategic Product* (SP) dalam forum WTO; (2) penerapan tarif dan hambatan non-tarif untuk komoditas-komoditas beras, kedelai, jagung, gula, beberapa produk hortikultura dan peternakan.
- d. Kebijakan pengembangan industri yang lebih menekankan pada agroindustri skala kecil di perdesaan dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan pendapatan petani.
 - e. Kebijakan di bidang transportasi yang terkait erat dengan peningkatan produktifitas, mutu, dan daya saing produk pertanian yang pada umumnya mudah rusak (*perishable*).
 - f. Kebijakan pembiayaan untuk mengembangkan lembaga keuangan yang khusus melayani sektor pertanian, lembaga keuangan mikro, pembiayaan pola syariah, dan lainnya. Kebijakan ini perlu memecahkan persoalan ketiadaan agunan para petani dan peternak, baik skala menengah dan kecil.
 - g. Kebijakan investasi yang kondusif untuk lebih mendorong minat investor dalam sektor pertanian.
 - h. Kebijakan penganggaran yang lebih memprioritaskan sektor pertanian dan sektor-sektor pendukungnya.
 - i. Kebijakan pemerintah daerah yang lebih berpihak pada pertanian, meliputi : infrastruktur pertanian, pemberdayaan penyuluh pertanian, pengembangan instansi lingkup pertanian, menghilangkan berbagai pungutan yang mengurangi daya saing pertanian, serta alokasi APBD yang memadai.

Operasionalisasi RPPK di lingkup pertanian, dituangkan kedalam tiga (3) program utama pembangunan pertanian jangka menengah 2005-2009, yaitu : (1) Program peningkatan ketahanan pangan; (2) Program pengembangan agribisnis; dan (3) Program peningkatan kesejahteraan petani.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan diarahkan untuk fasilitasi peningkatan ketahanan masyarakat melalui : (1) peningkatan keanekaragaman produk pertanian, ketersediaan dan konsumsi pangan serta produk olahannya, (2) pengembangan usaha bisnis pangan yang kompetitif, (3) pengembangan budaya

Keynote speaker dalam "SEMINAR ON AGRICULTURAL SCIENCES 2009" DI Tokyo University of Agriculture, Jepang, pada Tanggal 22 Februari 2009 yang diadakan oleh Indonesian Agricutural Sciences Association (IASA).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



produksi dan konsumsi pangan lokal, dan (4) pengembangan kelembagaan pangan secara partisipatif, terpadu dan berkelanjutan. Operasionalisasi Program Peningkatan Ketahanan Pangan dilaksanakan melalui : (1) peningkatan produksi pangan, (2) menjaga ketersediaan pangan yang cukup, aman, dan halal terjangkau di setiap daerah setiap saat, dan (3) antisipasi agar tidak terjadi kerawanan pangan.

Program Pengembangan Agribisnis diarahkan untuk fasilitasi berkembangnya usaha-usaha agribisnis pada sub-sistem hulu, sub sistem *on farm*/budidaya, sub-sistem pengolahan, sub-sistem pemasaran hasil, dan sub-sistem penunjangnya. Operasionalisasi Program Pengembangan Agribisnis dilaksanakan melalui Pengembangan Kawasan Agribisnis Komoditas Unggulan Tradisional dan Baru. Dalam implementasinya diperlukan keterpaduan, baik keterpaduan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, antar pelaku usaha agribisnis sehingga mampu menghasilkan produk pertanian unggulan yang berdaya saing tinggi.

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, diarahkan untuk fasilitasi : (1) pemberdayaan masyarakat petani, (2) percepatan akses petani terhadap sumberdaya produktif, dan (3) perlindungan petani dan kegiatan usahanya. Operasionalisasi Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dilaksanakan melalui : (1) pemberdayaan penyuluhan; (2) pendampingan dan pembimbingan; (3) penjaminan usaha; (4) perlindungan harga gabah; (5) kebijakan proteksi dan promosi lainnya; serta (6) kebijakan tata niaga produk pertanian yang kondusif.

Pelaksanaan program pembangunan dilaksanakan melalui program dan kegiatan '*satu desa, satu penyuluh, dan satu produk unggulan*'. Program pembangunan berorientasi pada pertanian moderen berbasis desa, yang merupakan manifestasi dari '*Panca Yasa*' yang secara garis besar mengandung upaya pengembangan kelembagaan petani dan penyuluh, fasilitasi prasarana dan sarana serta pembiayaan, dan penguatan daya saing berikut pemasaran.

Sementara itu, kebijakan Departemen Pertanian untuk mendukung prioritas pembangunan nasional meliputi : (1) Pengembangan insentif untuk memproduksi (bibit, pupuk, parasarana dan sarana, penghargaan, modal usahatani, dan lain-lain); (2) Advokasi untuk mengurangi hambatan fiskal di daerah guna menarik investor; (3) Fasilitasi pekerjaan publik (pengamat organisme pengganggu tanaman, kelembagaan benih,

Keynote speaker dalam "SEMINAR ON AGRICULTURAL SCIENCES 2009" DI Tokyo University of Agriculture, Jepang, pada Tanggal 22 Februari 2009 yang diadakan oleh Indonesian Agricutural Sciences Association (IASA).



penyuluh, pasar, dan sebagainya); (4) Pengembangan dan diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek); dan (5) petani dan peternak

Dalam pidato kenegaraan menyambut Hari Kemerdekaan ke-63 di depan anggota DPR/MPR, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara khusus memberi apresiasi. Program revitalisasi selama tiga tahun terakhir, kata SBY, telah berhasil mendorong sektor pertanian mengalami pertumbuhan tinggi. "Prestasi ini, berhasil mengamankan ketahanan pangan kita, pada saat dunia mengalami tekanan harga pangan yang sangat tinggi, dan munculnya kecenderungan proteksionisme global dalam bentuk larangan ekspor komoditas pangan."

Tingginya pertumbuhan PDB pertanian itu seiring dengan melejitnya capaian ekspor hasil pertanian periode Januari-Juni 2008 yang meningkat 50,13% dibanding periode yang sama tahun lalu. Angka kenaikan 50,13% itu lebih baik dari catatan sebelumnya. Awal Juli, BPS melaporkan, selama periode Januari-Mei 2008, ekspor pertanian meningkat 48.54% dari 1.886,3 juta dolar AS menjadi 2.369,9 juta dolar AS. Angka ini terbilang yang tertinggi dalam enam tahun terakhir.

Sektor pertanian, tegas Mentan, telah dan terus dituntut berperan dalam perekonomian nasional, antara lain melalui: pembentukan PDB, penerimaan devisa/ekspor, penyediaan pangan, dan penyediaan bahan baku industri. Sektor pertanian juga berperan dalam meratakan pembangunan melalui upaya pengentasan kemiskinan, penyedia lapangan kerja dan perbaikan pendapatan masyarakat. Dengan demikian melalui pembangunan sektor pertanian terjadi perpaduan antara aspek pertumbuhan dan pemerataan pembangunan.

Sebagai salah satu kasus yang cukup menarik untuk diperhatikan adalah fenomena kebangkitan swasembada beras. Setelah swasembada tahun tahun 1984, baru bisa swasembada kembali pada tahun 2008. Kedepan Indonesia harus juga mandiri dalam urusan kedaulatan pangan dan Negara.

Yang juga penting adalah bahwa program ketahanan pangan bukan merupakan kepentingan pemerintah tapi bermanfaat langsung bagi kesejahteraan petani, terbukti dengan naiknya indeks nilai tukar petani. Yang pada akhirnya permasalahan utama bangsa saat ini yaitu kemiskinan, kerawanan pangan, ekonomi perdesaan, dan stabilitas nasional dapat diatasi. Pentingnya ketahanan pangan

Keynote speaker dalam "SEMINAR ON AGRICULTURAL SCIENCES 2009" DI Tokyo University of Agriculture, Jepang, pada Tanggal 22 Februari 2009 yang diadakan oleh Indonesian Agricutural Sciences Association (IASA).



dalam mendukung stabilitas nasional perlu terus disosialisasikan dan diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Peran sektor pertanian yang penting dalam suatu perekonomian mengharuskan pemerintah memperhatikan sektor ini. Di Indonesia, sektor pertanian baru dijadikan sektor penyangga perekonomian. Kesulitan-kesulitan yang petani hadapi kurang mendapat respon dari pemerintah. Salah satu kendala yang petani hadapi dalam kegiatan produksinya adalah sulitnya mengakses lahan pertanian. *Land reform*, seperti telah dilakukan di banyak negara, juga mungkin diimplementasikan di Indonesia. *Land reform* sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi dalam pandangan Islam yang menginginkan keadilan dan pemanfaatan faktor produksi secara optimal. Oleh karena itu, usaha-usaha yang mengarah kepada terealisasinya program *land reform* di Indonesia, perlu didukung.

Pembangunan Pertanian Indonesia

Tujuan akhir pembangunan pertanian adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui sistem pertanian industrial. Secara operasional pencapaian tujuan tersebut ditempuh melalui tahapan-tahapan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Kebijakan dan program pembangunan pertanian jangka panjang dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka menengah (lima tahunan) dan selanjutnya dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana pembangunan pertanian tahunan.

Departemen Pertanian telah menyusun Cetak Biru (*Blue Print*) Pembangunan Pertanian Jangka Panjang (2005 - 2025), Jangka Menengah (2005-2009) dan tahunan. Adapun sasaran jangka panjang pembangunan pertanian, adalah : (1) Terwujudnya sistem pertanian industrial yang berdayasaing; (2) Mantapnya ketahanan pangan secara mandiri; (3) Terciptanya kesempatan kerja bagi masyarakat pertanian serta (4) Terhapusnya kemiskinan di sektor pertanian dan tercapainya pendapatan petani US\$ 2500/kapita/tahun.

Sedangkan tujuan jangka menengah pembangunan pertanian (2005-2009) adalah : (1) membangun SDM aparatur profesional, petani mandiri, dan kelembagaan pertanian yang kokoh; (2) meningkatkan pemanfaatan sumberdaya

Keynote speaker dalam "SEMINAR ON AGRICULTURAL SCIENCES 2009" DI Tokyo University of Agriculture, Jepang, pada Tanggal 22 Februari 2009 yang diadakan oleh Indonesian Agricutural Sciences Association (IASA).



pertanian secara berkelanjutan; (3) memantapkan ketahanan dan keamanan pangan; (4) meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian; (5) menumbuh-kembangkan usaha pertanian yang akan memacu aktivitas ekonomi perdesaan; dan (6) membangun sistem manajemen pembangunan pertanian yang berpihak kepada petani.

Untuk pencapaian tujuan tersebut pemerintah menyusun strategi, kebijakan dan mengimplementasikan berbagai program/kegiatan pembangunan pertanian, baik lintas subsektor maupun program subsektor. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2005-2009, ada **tiga kebijakan utama** yang diimplementasikan Departemen Pertanian, yaitu: (1) Peningkatan Produksi Pangan dan Akses Rumah Tangga terhadap Pangan; (2) Peningkatan Produktivitas dan Kualitas Produk Pertanian; (3) Perluasan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Ekonomi Perdesaan.

Selanjutnya, dalam implementasi kebijakan-kebijakan tersebut ada **dua strategi besar** yang ditempuh Departemen Pertanian. **Pertama**, memperkokoh fondasi pembangunan pertanian melalui **Panca Yasa**, ditempuh dengan strategi : (1) Penyediaan/perbaikan infrastruktur; (2) Penguatan kelembagaan; (3) Perbaikan sistem penyuluhan; (4) Penanganan pembiayaan pertanian; (5) Fasilitasi pemasaran hasil pertanian.

Kedua, melakukan Akselerasi pembangunan pertanian, yang ditempuh melalui strategi, yaitu: a) melibatkan partisipasi berbagai komponen masyarakat, b) padanan satu desa – satu penyuluh, c) sinergisme seluruh potensi sumberdaya, d) fokus komoditas, e) perencanaan berdasarkan *master plan* dan *road map*, f) penguatan Sistem Monitoring dan Data Base, dan g) pengarusutamaan gender dan pendekatan sosial budaya.

Dengan beragamnya jenis komoditas pertanian yang tumbuh di Indonesia, diperlukan strategi yang tepat dalam menentukan pilihan komoditas yang prioritas untuk dikembangkan. Prioritas penanganan difokuskan pada komoditas pertanian yang secara nasional dapat memberikan dampak nyata dan dirasakan hasilnya oleh petani, maupun masyarakat konsumen. Sehubungan itu, telah dirumuskan lima komoditas pangan utama yang diprioritaskan dengan sasaran akhir sebagai berikut:

Keynote speaker dalam “SEMINAR ON AGRICULTURAL SCIENCES 2009” DI Tokyo University of Agriculture, Jepang, pada Tanggal 22 Februari 2009 yang diadakan oleh Indonesian Agricutural Sciences Association (IASA).



(a) padi dengan sasaran swasembada berkelanjutan; (b) jagung dengan sasaran swasembada tahun 2007-2008; (c) kedele dengan sasaran swasembada tahun 2015; (d) gula dengan sasaran swasembada tahun 2009; dan (e) daging sapi dengan sasaran mencapai kecukupan tahun 2010.

Tantangan dan permasalahan mendasar pembangunan sektor pertanian berkaitan dengan sarana prasarana, permodalan, pasar, teknologi, dan kelembagaan petani, yang masih memerlukan penanganan yang berkelanjutan disamping munculnya persoalan-persoalan baru. Walaupun dihadapkan pada berbagai permasalahan dan hambatan, sektor pertanian telah mampu menunjukkan keberhasilan dan perkembangan yang menggembirakan.

Selama periode 2004-2008 pertumbuhan produksi tanaman pangan secara konsisten mengalami peningkatan yang signifikan. Produksi padi meningkat rata-rata 2,78% per tahun (dari 54,09 juta ton GKG tahun 2004 menjadi 60,28 juta ton GKG tahun 2008 (ARAM III), bahkan bila dibanding produksi tahun 2007, produksi padi tahun 2008 meningkat 3,12 juta ton (5,46%). Pencapaian angka produksi padi tersebut merupakan angka tertinggi yang pernah dicapai selama ini, sehingga tahun 2008 Indonesia kembali dapat mencapai swasembada beras, bahkan terdapat surplus padi untuk ekspor sebesar 3 juta ton. Keberhasilan tersebut telah diakui masyarakat internasional, sebagaimana terlihat pada Pertemuan Puncak tentang Ketahanan Pangan di Berlin bulan Januari 2009. Beberapa negara menaruh minat untuk mendalami strategi yang ditempuh Indonesia dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Demikian pula produksi jagung meningkat 9,52% per tahun (dari 11,23 juta ton pipilan kering tahun 2004 menjadi 15,86 juta ton tahun 2008). Bahkan dibanding produksi jagung tahun 2007, peningkatan produksi jagung tahun 2008 mencapai 19,34% (naik 2,57 juta ton). Pencapaian produksi jagung tahun 2008 juga merupakan produksi tertinggi yang pernah dicapai selama ini. Selanjutnya, produksi kedele juga meningkat 2,98% per tahun dari 723 ribu ton biji kering tahun 2004 menjadi 761 juta ton biji kering tahun 2008 (ARAM III).

Peningkatan produksi tanaman pangan yang spektakuler tahun 2008 (terutama padi dan jagung), dapat dijelaskan oleh beberapa faktor. *Pertama*, kondisi

Keynote speaker dalam "SEMINAR ON AGRICULTURAL SCIENCES 2009" DI Tokyo University of Agriculture, Jepang, pada Tanggal 22 Februari 2009 yang diadakan oleh Indonesian Agricutural Sciences Association (IASA).



iklim memang sangat kondusif dengan curah hujan yang cukup tinggi dan musim kemarau relatif pendek. *Kedua*, perkembangan harga-harga komoditas pangan di dalam negeri yang kondusif sebagai refleksi dari perkembangan harga di pasar dunia dan efektifitas kebijakan pemerintah. *Ketiga*, pengaruh berbagai kebijakan dan program pemerintah meliputi penetapan harga, pengendalian impor, subsidi pupuk dan benih, benih gratis, penyediaan modal, akselerasi penerapan inovasi teknologi, dan penyuluhan.

Untuk komoditas sumber pangan lainnya, produksi gula/tebu juga meningkat 6,76% per tahun dari 2,05 juta ton tahun 2004 menjadi 2,85 juta ton tahun 2008 (ARAM, 2011). Demikian juga untuk komoditas daging sapi, baik dari segi populasi maupun produksi daging meningkat cukup besar. Peningkatan populasi ternak mencapai 12,75% (dari 10,5 juta ekor tahun 2004 menjadi 11,87 juta ekor tahun 2008), sedangkan produksi daging sapi meningkat 3,83% (dari 339,5 ribu ton menjadi 352,4 ribu ton).

Beberapa kebijakan pokok yang memberikan kontribusi terhadap pencapaian produksi pangan tersebut adalah: (a) Pengawasan Dan Bantuan Sarana Produksi: benih/bibit unggul, pupuk, alat mesin pertanian, obat hewan; (b) Bantuan Permodalan: fasilitas kredit kkp-E, BLM- KIP, PUAP, DPM-LUEP, KP-ENRP, LM3, PMUK; (c) Perbaikan Infrastruktur Pertanian: perluasan Areal, JITUT, JIDES, TAM, jalan usaha tani, embung, pengembangan irigasi air tanah; (d) Fasilitas Pengembangan Pasar dan Peningkatan Mutu Produk; (e) Inovasi dan Percepatan Diseminasi Teknologi; (f) Pendampingan dan pengawalan intensif: SL PHT, SL PHP, SL Iklim, penyuluh, tokoh masyarakat, aparat; (g) Penyediaan Dana Tanggap Darurat; dan (h) Koordinasi Intensif Pusat - Daerah.

Kesejahteraan

Dalam Al Qur'an, sebuah wilayah atau negara digolongkan memiliki kesejahteraan dan kemakmuran apabila rakyatnya memiliki rasa aman dari dua hal, yaitu aman dari rasa lapar dan rasa takut. Oleh karena pentingnya ketahanan pangan itu, sejak lama pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang No.7 Tahun 1996 tentang pangan: dimana ketahanan pangan merupakan: "Kondisi terpenuhinya

Keynote speaker dalam "SEMINAR ON AGRICULTURAL SCIENCES 2009" DI Tokyo University of Agriculture, Jepang, pada Tanggal 22 Februari 2009 yang diadakan oleh Indonesian Agricutural Sciences Association (IASA).



pangan bagi setiap rumah tangga, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau”.

Berdasarkan pemahaman undang-undang tersebut, bahwa tercapainya peningkatan jumlah produksi pangan saja belum bisa dinyatakan bahwa Negara kita memiliki ketahanan pangan yang baik. Ketahanan pangan juga harus memenuhi persyaratan selain terpenuhinya kondisi jumlah pangan, juga distribusinya yang harus merata dan akses/kemampuan membelinya bagi setiap warga negara.

Dengan pemahaman yang sama akan ketahanan pangan tersebut, kita sebagai warga Negara, baik dosen, akademisi, politisi, petani, pedagang, hingga mahasiswa akan dapat menentukan diposisi apa kita akan mengambil peran dalam mendukung ketahanan pangan nasional Negara kita.

Ini penting, mengingat Negara kita adalah Negara besar yang dikaruniai Allah SWT begitu banyak potensi, baik potensi sumberdaya alam yang hampir semuanya ada, potensi jumlah penduduk yang banyak, potensi wilayah yang luas dan lain-lain. Karena dalam membangun Negara yang besar ini khususnya dalam rangka membangun ketahanan pangan merupakan seni bagaimana membangun kemampuan suatu bangsa untuk menjamin setiap penduduknya memperoleh pangan yang cukup, mutu yang layak, aman dan halal; yang didasarkan pada optimalisasi pemanfaatan dan berbasis pada keragaman sumberdaya lokal.

Ketahanan pangan berarti pula kemandirian pangan. Pemenuhan kebutuhan pangan diutamakan bersumber dari produksi dalam negeri. Kalau pangan kita tergantung dari impor, maka ketergantungan dari Negara lain akan sangat besar yang berarti pula kemandirian dan jaminan kesejahteraan rakyat tergantung Negara lain. Kekurangan pangan pastinya akan berdampak pada berbagai sektor, baik ekonomi, politik dan sosial yang ujungnya akan berdampak pada kesejahteraan rakyat yang rendah.

Kesejahteraan Petani dan Masyarakat

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional, Nilai tukar petani (NTP) sebagai salah satu indikator kesejahteraan petani secara konsisten mengalami peningkatan selama

Keynote speaker dalam “SEMINAR ON AGRICULTURAL SCIENCES 2009” DI Tokyo University of Agriculture, Jepang, pada Tanggal 22 Februari 2009 yang diadakan oleh Indonesian Agricutural Sciences Association (IASA).

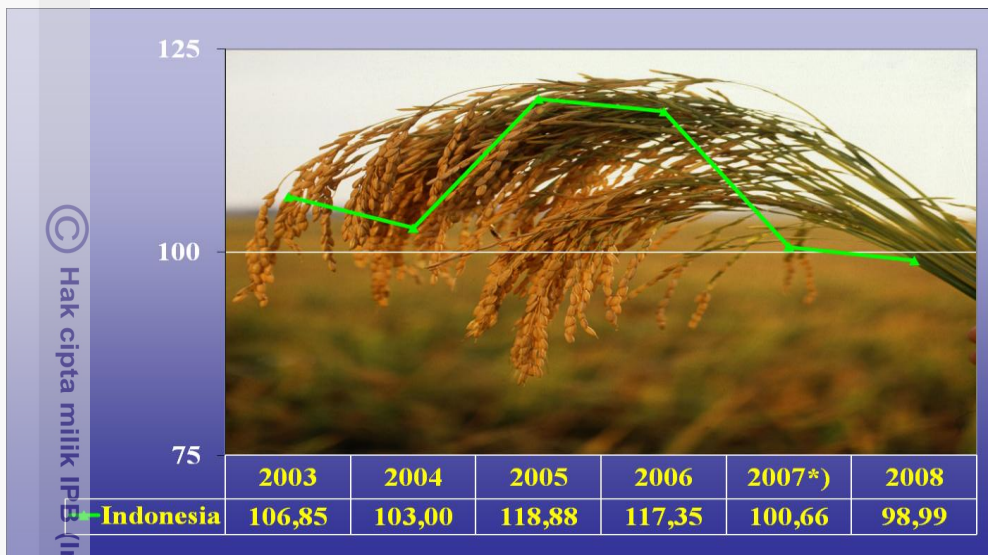
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IPB Institut Pertanian Bogor

Bogor Agricultural University

periode tahun 2006-2008 dengan pertumbuhan sebesar 2,52 persen per tahun. Hal ini nampak pada Gambar-1 berikut di bawah ini.



Keterangan : *)Indeks 2007=100, sesungguhnya trend terus meningkat, hanya saja sejak tahun 2007 BPS menetapkan tahun 2007 sebagai tahun dasar yang baru dalam penentuan NTP)

Gambar 1. Perkembangan Nilai Tambah Petani (NTP) Nasional

Dengan kinerja yang kundusif seperti itu, neraca perdagangan komoditas pertanian mengalami peningkatan secara konsisten selama periode 2005-2008 dengan rata-rata pertumbuhan 29,29 persen per tahun. Selain itu, pertumbuhan tenaga kerja sektor pertanian 1,56%/tahun, lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan total angkatan kerja (1,24%/tahun) dan tenaga kerja non pertanian yang hanya sekitar 0,98%/tahun. Melihat kondisi tersebut mengakibatkan. Rata-rata pertumbuhan nilai investasi sektor pertanian tahun 2005-2007 mencapai 172,8%/tahun, lebih tinggi dibanding sektor lain.

Jika dibandingkan dengan beberapa Negara ASEAN, produksi dan produktivitas pangan strategis Indonesia relatif lebih tinggi. Gambaran tentang produksi dan produktivitas padi dan jagung di beberapa Negara ASEAN tercantum dalam Tabel-2 dan 3.

Keynote speaker dalam "SEMINAR ON AGRICULTURAL SCIENCES 2009" DI Tokyo University of Agriculture, Jepang, pada Tanggal 22 Februari 2009 yang diadakan oleh Indonesian Agrultural Sciences Association (IASA).

